

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat minoritas yaitu tunanetra di Indonesia merupakan masyarakat yang selama ini masih kurang mendapat perhatian penuh dari masyarakat maupun dari pemerintah. Tunanetra mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya pada masa sekarang di era teknologi yang semakin meningkat ini ternyata kurang diimbangi dengan sikap masyarakat pendidikan dasar kepada mereka yang tunanetra dan secara umum kepada penyandang ketunaan. Pada kenyataannya masyarakat pendidikan dasar masih banyak menganggap “negatif” kepada mereka yang tunanetra. Bahkan di kalangan masyarakat pendidikan dasar masih meragukan kemampuan tunanetra, bahkan sebagian besar diantara mereka belum mengetahui dan belum mengenal siapa itu individu tunanetra, apa yang dapat dilakukannya, dan apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif, sehingga sikap mereka masih sebatas kasihan kepada tunanetra. UUD 1945 pasal 31 menyatakan: “Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan”.

Hal ini menunjukkan bahwa tunanetra berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak awas) dalam pendidikan. Tulisan seperti di atas sudah sering kita dengar, tetapi tulisan itu sengaja penulis lakukan sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat pendidikan dasar agar memiliki kepedulian dan perhatian penuh terhadap pendidikan inklusif bagi tunanetra.

Inklusi adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Mereka yang percaya inklusi meyakini bahwa semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan masyarakat, apapun perbedaan mereka. Dalam pendidikan ini berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidak mampuan mereka, latar belakang sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa, agama atau jender, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak yang memiliki hambatan, seperti tunanetra; Secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan bulan Juni 1994 bahwa prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah (selama memungkinkan) semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Sekolah inklusif dimulai dengan filosofi bahwa semua anak dapat belajar dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum. Keanekaragaman antar anak dihargai, dan diyakini bahwa keanekaragaman menguatkan kelas dan menawarkan semua kesempatan yang lebih besar untuk pembelajaran anak.

Di Indonesia, pendidikan inklusif di dalam sekolah inklusi baru ditetapkan semenjak tahun 2002. Dahulu istilahnya adalah sekolah terpadu. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima siswa-siswi berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tuna rungu, dan tunadaksa. Hingga pada tahun 2003, setelah di sahkannya UU No.20 mengenai Sistem Pendidikan Layanan Khusus, maka sekolah terpadu kemudian ditetapkan menjadi sekolah inklusi.

Program pendidikan inklusif ini yang sebenarnya lebih manusiawi dan sejalan dengan amanah UUD 1945 (amandemen), sebagaimana terkandung dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 berikut ini:

- ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Senada dengan UUD 1945, dalam pasal 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa:
- ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- ayat (2): Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;

Perlu disadari bahwa kesempatan bagi tunanetra untuk memperoleh pendidikan umum, saat ini masih sangat minim. Minimnya kesempatan tersebut, dalam pandangan penulis akan semakin mempersulit pengembangan potensi dan skill yang dimiliki tunanetra. Padahal, akses pendidikan yang kita ketahui bukan hanya diberikan kepada anak normal, melainkan tunanetra pun juga berkesempatan untuk mengenyam pendidikan umum. Namun pada kenyataannya di lapangan masyarakat pendidikan dasar lebih mengutamakan siswa yang awas. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Dokumen Pendidikan untuk Semua ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan. Akan tetapi, di Indonesia, misalnya, menurut data Depdiknas tahun 2002, hanya sekitar 7,5% anak penyandang cacat usia sekolah yang sudah memperoleh pendidikan formal di sekolah reguler, kenyataan inilah, Bambang

Basuki salah seorang pendiri Yayasan Mitra Netra, yang juga guru SLB mengatakan bahwa tunanetra yang tidak mempunyai gangguan akademik dan juga emosional, mereka hanya membutuhkan rehabilitasi, kemudian aksesibilitas dan perlakuan khusus. Rehabilitasi itu berupa konseling bahwa mereka menerima kebutaannya, baik yang low vision dengan menggunakan pembesaran huruf dan orientasi mobilitas karena tidak bergerak dengan mandiri.

Sebenarnya anjuran kepada masyarakat secara umum tentang kesadaran kepada tunanetra sudah sering dilakukan, baik di masmedia cetak, elektronik, melalui seminar-seminar tingkat daerah sampai tingkat internasional. Misalnya dalam acara-acara di media elektronik sudah sering ditampilkan profil seorang tunanetra yang berhasil, baik keberhasilan melalui jalur pendidikan formal maupun melalui keterampilan yang diperolehnya melalui pelatihan-pelatihan. Namun semua itu pada kenyataannya belum membuka mata masyarakat pendidikan dasar untuk memberi kesempatan kepada tunanetra.

Karena sebagian besar masyarakat pendidikan dasar masih menganut pandangan yang salah ini, maka besar kemungkinan bahwa pandangan tersebut juga akan tercermin dalam sikap tunanetra terhadap dirinya sendiri. Gambaran atau profil seorang tunanetra sudah melekat dalam benak masyarakat pendidikan dasar bahwa ia adalah orang yang butuh bantuan keseluruhan, akibatnya, adalah pada diri seorang anak tunanetra dapat membatasi ruang geraknya untuk mengembangkan kemampuannya di masyarakat, walaupun ia mau aktif untuk melakukan suatu kegiatan, orang lain sudah terlebih dahulu mengatakan “biar saya yang mengerjakan” sehingga tunanetra hanya tinggal diam tanpa melakukan

aktifitas yang seharusnya dapat dilakukan tunanetra. *Label* yang diberikan kepada seseorang akan mempengaruhi cara orang lain berperilaku terhadap dirinya.

Dalam pendidikan seorang tunanetra masih terbatas ruang geraknya untuk memasuki jenjang pendidikan, hanya sekolah-sekolah tertentu yang bersedia menerima. Dengan kata lain masih sebagian kecil sekolah yang mau menerima tunanetra dengan alasan sekolah tersebut belum menyediakan fasilitas untuk tunanetra, belum tahu cara mendidik dsb, sehingga tidak jarang penulis sering gagal mencari sekolah yang mau menerima tunanetra. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum banyak dimengerti secara mendalam oleh masyarakat pendidikan dasar sehingga tunanetra mengalami hambatan untuk meneruskan cita-citanya. Karena sebagian besar tunanetra ingin mendapat kesempatan yang sama dengan orang awas, baik dalam dunia pendidikan, lapangan kerja ataupun dalam lingkungan sosialnya.

Demikian juga untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebagian besar masih meragukan kemampuan tunanetra. Masih ada masyarakat maupun pemerintah yang beranggapan bahwa penyandang tunanetra tidak bisa bekerja dengan baik, tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memegang suatu jabatan, lebih banyak merepotkan, dan menambah pengeluaran akomodasi dan fasilitas khusus. Hal inilah yang membuat pelamar yang kebetulan penyandang tunanetra gagal diterima, bahkan sebelum mereka menunjukkan kualifikasinya sudah ditolak. Sebenarnya dasar hukum yang melindungi hak bekerja bagi penyandang cacat adalah UU No. 4 tahun 1997 pasal 13 yang berbunyi: "Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan

pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.” Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 14, yang menyatakan, “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya, sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada atau kualitas perusahaan”. Tapi pada kenyataannya UU seperti tersebut di atas masih sangat sulit untuk diwujudkan.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bagaimana sikap masyarakat pendidikan dasar terhadap tunanetra. Dari beberapa kali pengamatan disimpulkan ada beberapa karakteristik yang tidak mendukung orang awas kepada mereka antara lain: tunanetra adalah orang yang membutuhkan bantuan secara total, tidak berdaya, memiliki ruang gerak yang sangat terbatas, identik dengan kemiskinan, pribadi yang mudah putus asa dan frustrasi, kemampuan yang rendah, tidak perlu sekolah karena tidak ada lapangan pekerjaan untuk mereka, karena orang awas yang sarjanapun banyak yang pengangguran, miskin konsep, sering terdengar dari masyarakat adalah kata “kasihan”. Hampir setiap orang yang melihat tunanetra mengatakan “kasihan ya”. Karena itu tunanetra sering digambarkan sebagai orang yang tak berdaya, tidak mandiri dan hidup menderita, karena purbasangka yang demikianlah maka masyarakat awas mengatakan tunanetra patut dikasihani, selalu butuh perlindungan dan bantuan.

Dodds, (dalam tarsidi: 1993) mengemukakan bahwa persepsi negatif tentang ketunanetraan sering sengaja dipertahankan dan diperkuat oleh badan-badan amal demi menggugah hati banyak dermawan. Hal serupa sering kita

jumpai di masyarakat dimana orang mencari bantuan dengan mengatasnamakan tunanetra. Akibatnya masyarakat jarang menjumpai model tunanetra yang positif, tunanetra yang mandiri dengan banyak aktifitas. Kemudian dalam dunia hiburan, seni misalnya dalam sinetron-sinetron, sering menampilkan seorang tunanetra dengan banyak keterbatasan sehingga selalu dan selalu dibantu dalam keseluruhan kegiatannya, bahkan hal yang kecil untuk mengambil air minumnya orang awas langsung mengembilkannya. Keadaan inilah yang menguatkan orang awas merasa hanya sebatas kasihan melihat tunanetra, tanpa mengetahui bahwa banyak tunanetra yang sudah hidup mandiri melalui keterampilan dan bidang akademik yang mereka telah tempuh dengan bersusah payah.

Kata kasihan ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tunanetra. Yang paling penting bagi tunanetra adalah mereka diberi kesempatan, dihargai sebagai manusia pada umumnya untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin dan mendapat kesempatan untuk berkompetisi dengan orang awas pada umumnya sesuai kesanggupan apa yang dapat lakukan tunanetra.

Teks yang menyertai logo dari *National Federation Of The Blind*, persatuan tunanetra Amerika serikat adalah: *“The real problem of the blindness is not lack of eyesight. The real problem is the misunderstanding and lack information which exist. If a blind person has proper training and opportunity, blindness is only a physical nuisance”* (dalam Tarsidi: 2004). Teks tersebut menyampaikan bahwa masalah yang sesungguhnya dari tunanetra yang paling besar bukanlah karena ia tunanetra tetapi karena kesalahfahaman dan kurangnya

informasi tentang ketunanetraan kepada masyarakat atau instansi pemerintahan dan swasta. Jadi apabila seorang tunanetra memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan seorang tunanetra, dan masyarakat memberi kesempatan, dengan demikian ketunanetraan bukanlah menjadi suatu alasan yang fundamental. Hal ini menyiratkan bahwa dengan pendidikan dan keterampilan yang tepat dan selanjutnya diberi kesempatan sama seperti orang awas pada umumnya, maka tunanetra akan dapat melakukan pekerjaan pada umumnya dan di tempat kerja pada umumnya, dan dapat melakukan pekerjaan seperti orang awas juga. James H. Omvig, (dalam Tarsidi :1999) mengemukakan bahwa setiap hari ribuan orang tunanetra, laki-laki maupun perempuan, yang telah diberi pendidikan dan latihan yang tepat, berhasil bekerja sebagai petani dan pekerja pabrik, juru mesin, dan petugas pemeliharaan, dosen perguruan tinggi, guru sekolah umum, ahli kimia, dan ilmuwan lainnya, pengacara, agen asuransi, atau real estate, pengusaha di berbagai bidang, juru masak, pencuci piring, buruh dan politisi.

Perkembangan kognitif tunanetra tidak jauh berbeda dengan tetangganya orang awas, itu terbukti banyaknya tunanetra yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri atau swasta, sebagai contoh pada saat ini ada sekitar 56 mahasiswa tunanetra sekolah di UPI Bandung. Jadi, dengan kata lain seorang tunanetra dapat bersekolah sampai tingkat yang lebih tinggi asal ia diberi kesempatan, ada kemampuan dan kemauan. Sebagai contoh di bawah ini ada beberapa profil tunanetra yang sudah berhasil dan mandiri.

1. Miles Hilton Barber, seorang pilot tunanetra yang sukses terbangkan pesawat Microlight (Harian PELITA, 25 Oktober 2007)

PESAWAT Microlight merupakan pesawat olahraga di kalangan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dan biasa diterbangkan para pilot-pilot dengan sertifikat yang diperoleh dengan seleksi sangat ketat. Salah satu persyaratan tersebut adalah sehat jasmani dan rohani. Namun kenyataannya membuktikan bahwa penyandang cacat tunanetra berhasil menerbangkan.

Bahkan Miles Hilton Barber yang pernah mengantongi rekor menerbangi Kanal Inggris dengan menerbangkan pesawat Microlight pada ketinggian 20.300 kaki itu, akan menambah panjang sejarah dalam dunia olahraga mengelilingi dunia untuk menggalang dana guna merestorasi penglihatan para orang-orang penyandang cacat netra yang berada di negara berkembang.

2. Rama, Seorang “Blogger” Tunanetra (sumber Kompas, 8 Juli 2008)
 Dalam buku tamu di blog miliknya, Eko Ramaditya Adikara menyebut dirinya sebagai *The Indonesian Blind Blogger*. Contoh saat dia mempraktikkan bagaimana menulis artikel di atas papan ketik komputer pribadi yang diperuntukkan bagi orang normal (bukan papan ketik Braille), Rama mampu menulis 60 kata per menit. Kemampuan itu setara dengan pengetik profesional mana pun yang biasa bekerja di atas papan ketik QWERTY. Rama bahkan tidak membuat kesalahan satu huruf pun atas apa yang ia tulis secepat angin berlalu itu.
3. Bart Hagem (32 tahun) seorang hakim tunanetra
 (Sumber Detik News, Selasa 23,06,2009)
 Hakim Bart Hagen akan menjalankan tugas dengan cara menandai dokumen, selanjutnya dengan bantuan teknologi dokumen itu diubah ke dalam bentuk suara. Sementara untuk mobilitas di gedung pengadilan, dia akan dipandu oleh anjing pemandunya yang setia.
4. Agung Rejeki Yuliasuti, seorang tunanetra yang menjadi psikolog (Sumber Radar Semarang, jumat 9 Januari 2009)
 Buta usia 25 tahun dan sering menjadi nara sumber seminar motivasi. Pernah terpilih menjadi salah satu dari delapan tokoh wanita Jawa Tengah yang dianggap mampu menjadi inspirasi perjuangan perempuan oleh partai PKS
5. Dr. Didi Tarsidi: Beliau seorang tunanetra yang berhasil meraih gelar doktor dari UPI Bandung. Beliau adalah salah seorang dosen di Pasca Sarjana UPI Bandung, beliau juga seorang tunanetra yang begitu mahir menggunakan komputer, mahir berbicara bahasa Inggris, menjadi presiden Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) se-Indonesia, dan juga beliau banyak menterjemahkan buku-buku yang berhubungan dengan ketunanetraan yang dimuat dalam blog-pribadinya.
6. Bambang Basuki (57 tahun) Pendiri Yayasan Mitra Netra
 Dia adalah pendiri ayasan Mitra Netra, yayasan non profit yang memberi layanan yang tepat dan inovatif kepada para tunanetra. “Siapa yang lebih mengerti tunanetra kalau bukan tunanetra itu sendiri”, betulkan? Katanya! Bambang menceritakan ihwal ia menjadi tak bisa melihat sama sekali. Penyandang cacat adalah manusia dengan tantangan istimewa. Begitu juga

dengan orang di sekitarnya. Jika mereka bisa mengatasi dengan baik, maka dia juga akan menjadi orang yang istimewa, katanya.

7. Saharuddin, yang sering juga dipanggil Andi Sebastian, Seorang tunanetra pejuang HAM (Sumber Kompas, Rabu 25 Juli 2007)
Lahir di Pare-pare, 28 Mei 1968, Alumnus Magister dari Universitas Hasanuddin, Saharuddin menjadi tunanetra pada usia 10 tahun. Beliau adalah salah seorang dari 11 anggota Komnas HAM, dan menjadi anggota Komnas HAM periode 2007-2012

Masih banyak lagi profil tunanetra yang berhasil dan mandiri yang mungkin masyarakat pendidikan dasar belum mengetahuinya. Jadi dengan demikian tidak menutup kemungkinan banyak tunanetra akan berhasil seperti contoh-contoh di atas apabila masyarakat pendidikan dasar memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pemerintah memberi kesempatan untuk berkompetisi dengan orang awas memasuki lapangan pekerjaan untuk tunanetra. Tetapi melihat kenyataan di lapangan kesempatan pendidikan yang diberikan kepada tunanetra untuk bersaing dengan orang awas masih sangat terbatas, masyarakat pendidikan dasar seolah-olah lebih mengutamakan orang awas untuk masuk sekolah reguler. Melihat kenyataan inilah penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya sikap masyarakat pendidikan dasar di kota Medan terhadap siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran sikap masyarakat pendidikan dasar kota Medan terhadap siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif ditinjau, jenjang sekolah tempat bekerja, pendidikan terakhir, jabatan, masa kerja jabatan, status kepegawaian, keikutsertaan dalam pelatihan pendidikan inklusif.
2. Bagaimana pendapat masyarakat pendidikan dasar terhadap siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif?
3. Apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif bagi tunanetra?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan gambaran tentang sikap masyarakat pendidikan dasar terhadap tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif ditinjau dari, masa kerja, status kepegawaian, pendidikan terakhir dan keikutsertaan pelatihan;
2. Mendapatkan gambaran bagaimana pendapat masyarakat pendidikan dasar terhadap tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif.
3. Mendapatkan gambaran faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif bagi tunanetra.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan serta bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan sikap masyarakat kepada

pendidikan inklusif bagi tunanetra. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis bagaimana gambaran sikap masyarakat pendidikan dasar terhadap tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif.
2. Sebagai bahan masukan bagi penulis faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif bagi tunanetra.
3. Bagi sekolah reguler sebagai bahan masukan bagi penulis tentang penerimaan siswa tunanetra tanpa membedakan, penyandang ketunaan atau tidak, kaya atau miskin dsb.
4. Bagi kepala sekolah dan guru, agar turut membantu program pendidikan inklusif bagi tunanetra, agar semua Anak Berkebutuhan Khusus dapat mengikuti pendidikan di tempat terdekat dengan rumahnya.

E. Definisi Konsep

1. Sikap

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Soekidjo Notoatmojo, dalam Mar'at). Yang dimaksud dengan sikap dalam penelitian ini adalah reaksi atau respon seseorang tentang pendidikan inklusif bagi tunanetra yang akan diukur dengan skala sikap

2. Masyarakat Pendidikan Dasar

Masyarakat pendidikan Dasar yang dimaksud penulis disini adalah guru dan kepala sekolah yang bertugas atau menjadi pendidik di sekolah pada tingkat

dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Mereka ini pada umumnya adalah yang secara langsung berhubungan dengan tunanetra dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar/mengajar.

3. Tunanetra:

Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total), hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata (kurang awas/*Low Vision*) (Tarsidi: 2008)

4. Pendidikan Inklusif

UNESCO (1994) dalam Alimin (2008:7) memberikan gambaran bahwa: Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa atau kondisi lain, termasuk penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis budaya, bahasa minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan *one school for all*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bermaksud untuk membuat penggambaran deskripsi, fakta, kejadian, atau hal khusus yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang

sikap masyarakat pendidikan dasar terhadap tunnetra yang mengikuti pendidikan inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Atau lebih tepat lagi penelitian ini menggunakan metode stasistik. Sukmadinata dalam Sugiyono (2005: 54)

2. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Teknik pengumpulan data adalah skala sikap. Melalui teknik skala sikap ini akan dikumpulkan data yang berupa jawaban tertulis dari responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan di dalam angket tersebut. Indikator-indikator dari variabel Sikap masyarakat pendidikan dasar terhadap siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif, merupakan materi pokok yang dibuat menjadi sejumlah pertanyaan dalam angket, sebagai instrumen akan dikembangkan skala sikap. Jenis skala sikap yang penulis pilih adalah model Likert (Azwar, 1988) yang mengharuskan subjek yang disurvei untuk memilih satu diantara 5 pilihan sikap. (Sangat setuju – setuju – tidak tahu – tidak setuju – sangat tidak setuju).

a. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Menurut Sugiyono (dalam Ridwan, 2005: 54) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua SD dan SMP di kota Medan yang belum melaksanakan pendidikan inklusif.

b) Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka penulis memilih 3 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di kota Medan untuk dijadikan sampel penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Di kecamatan yang tidak ada SLB dan tidak ada sekolah inklusif, sebanyak 2 (dua) sekolah
2. Di kecamatan yang ada Sekolah Luar Biasa, sebanyak (dua) 2 sekolah.
3. Di kecamatan yang ada Sekolah Inklusif, sebanyak (dua) 2 sekolah.

TABEL 1.1
Sekolah yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Nama Sekolah	Status	Jumlah Responden
1	SD N. XY	Negeri	18 orang
2	SD N. RS	Negeri	17 orang
3	SD N. PG	Negeri	19 orang
4	SMP N. MR	Negeri	33 orang
5	SMP N. PX	Negeri	38 orang
6	SMP N. FG	Negeri	35 orang
Total			160 orang

b. Pengolahan Data

Untuk pengolahan data ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan kembali instrumen penelitian yang berupa skala sikap yang telah di isi oleh para responden dalam penelitian ini.
- b) Memberi kode pada setiap instrumen yang telah dikembalikan.
- c) Menentukan skala penilaian terhadap jawaban yang diberikan responden pada instrumen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

- d) Skor yang diperoleh tiap responden dijumlahkan, setelah itu jumlah skor tersebut dibagi dengan banyaknya item pernyataan, kemudian hasil bagi tersebut dijumlahkan seluruhnya, lalu hasilnya dibagi kembali dengan banyaknya responden. Atau dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\frac{\sum x}{\sum item} = \sum \bar{X}$$

$$X_{akhir} = \frac{\sum \bar{X}}{\sum n}$$

- $\sum x$ = Jumlah item pernyataan tiap pertanyaan penelitian
 $\sum item$ = Jumlah rata-rata dari hasil bagi skor total dengan banyaknya item
 $\sum X$ = Jumlah responden seluruhnya
 $\sum n$ = Nilai rata-rata akhir untuk menjawab pertanyaan penelitian
 X_{akhir} = Jumlah skor total tiap responden

(Natawidjaya, 1997: 29)

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- 0 s/d 0,49 = Sikap yang sangat buruk
 0,50 s/d 1,49 = Sikap yang buruk
 1,50 s/d 2,49 = Sikap yang kurang baik
 2,50 s/d 3,49 = Sikap yang baik
 3,50 s/d 4,00 = Sikap yang sangat baik

Kriteria ini diambil berdasarkan sistem penilaian Skala Sikap.

3. Pengumpulan Data Kualitatif

a. Metode

Untuk mendapatkan hasil pada pertanyaan penelitian kedua dan ketiga penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

b. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dipilih adalah teknik wawancara dengan tujuan agar responden dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi latar belakang

berbagai sikap masyarakat pendidikan dasar terhadap tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif, dan faktor-faktor penghambat tentang pendidikan inklusif.

c. Partisipan Wawancara

Yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah 6 orang kepala sekolah dan 6 orang guru.

c. Teknik Analisis data

Prosedur analisis data atas dasar tiga tahap sesuai dengan saran, Nasution menyebutkan: (1) reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi data.

G. Kerangka Berfikir

Pada umumnya sikap merupakan gabungan dari konsep-konsep informasi dan emosi yang akibatnya akan mempengaruhi respon suka atau tidak suka terhadap suatu objek tertentu. Oleh karena itu untuk merubah sikap seseorang perlu diciptakan stimulus atau pendekatan-pendekatan yang memiliki kualitas rangsang yang tinggi. Penciptaan stimulus ini akan berpengaruh terhadap respon yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang diterimanya. Bila seseorang telah memberikan respon berupa perilaku yang diinginkan maka akan mudah untuk merubah sikap seseorang terhadap suatu hal.

Dalam proses interaksi, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap suatu objek psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap sebagaimana yang dikemukakan oleh Azwar (1998:30) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Pembentukan dan pengembangan sikap

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan diantaranya adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif individu, informasi dan afiliasi-afiliasi kelompok (Trisnamansyah dalam Azwar, 1989:28)

Sikap mempunyai pengaruh yang kuat pada tingkah laku manusia karena tingkah laku inilah yang menjembatani seseorang untuk merasakan kehidupannya dalam menempatkan tingkah laku sebagai bagian penting dari kehidupan seseorang. Mengutip kesimpulan dan data-data hasil penelitian para ahli tentang hubungan sikap dengan tingkah laku, Bandura (1969) dalam Tarsidi (2007) mengemukakan *“the attitude change approach is selected as a means of influencing behavior when desired behavior cannot be directly elicited and reinforced for practical or other reason.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan perubahan sikap dimaksudkan untuk merubah/mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perilaku yang diinginkan.

Demikian pula halnya dengan pembentukan sikap masyarakat pendidikan dasar di Medan, stimulus atau kondisi yang diharapkan dapat membentuk sikap positif terhadap tunanetra, misalnya melalui sosialisasi. Diadakannya sosialisasi tentang ketunanetraan kepada masyarakat pendidikan dasar di Medan diharapkan akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap positif masyarakat pendidikan dasar terhadap tunanetra. Oleh karena itu, sosialisasi sangat penting bagi masyarakat pendidikan dasar di Medan. Lingkungan secara timbal balik akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap dan dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar individu akan membentuk suatu proses yang kompleks yang akhirnya menentukan bentuk perilaku seseorang (Azwar 1998:14).